

RINGKASAN

Evaluasi Retensi Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur, Dhela Kalis Moordhaya, NIM G41182136, tahun 2022, Jurusan Kesehatan, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, dr. Novita Nuraini, MARS (Pembimbing 1), Arif Wahyu Wicaksono A.Md.PK (Pembimbing 2)

Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Surabaya adalah rumah sakit milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang didirikan berkenaan peristiwa yang menimpa para Jamaah Haji Indonesia di terowongan Mina pada tahun 1990 dan merupakan Rumah Sakit Umum Tipe B Pendidikan. Metode pelaksanaan dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun laporan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer. Cara penulis memperoleh data yaitu dengan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Pelaksanaan retensi dokumen rekam medis rawat inap di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur sudah memiliki SOP retensi dan pemusnahan. Waktu pelaksanaan retensi dilakukan setiap waktu saat petugas memiliki waktu luang dan setiap tahun akan dilakukan pemusnahan. Apabila petugas tidak memiliki waktu luang akan menyebabkan dokumen rekam medis yang diretensi tidak cepat selesai. Tidak adanya waktu khusus pelaksanaan retensi akan menyebabkan penumpukan dokumen rekam medis dan dapat mengganggu kelancaran proses kerja. Penumpukan dokumen rekam medis akan mempengaruhi kelancaran dan kecepatan kerja petugas di bagian filling. Formulir rekam medis yang memiliki nilai guna diletakkan dalam kardus. Sehingga formulir tersebut sangat mudah mengalami kerusakan dan apabila diperlukan maka memerlukan waktu lama untuk mencari formulir yang dibutuhkan.

Pelaksanaannya Retensi Dokumen Rekam Medis Rawat Inap di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa hal yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu adanya jadwal retensi arsip, tempat penyimpanan rekam medis rawat inap aktif dan inaktif yang sudah dipisah, formulir rekam medis yang

memiliki nilai guna, adanya tim pemusnahan dokumen rekam medis. Hal yang kurang sesuai seperti waktu pelaksanaan retensi yang dilakukan oleh petugas, cara penyimpanan formulir rekam medis rawat inap inaktif, cara penyimpanan dokumen rekam medis kematian dan bayi serta cara penyimpanan formulir rekam medis yang memiliki nilai guna. Hambatan dalam pelaksanaan retensi dokumen rekam medis rawat inap di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur berupa hambatan pada waktu pelaksanaan retensi dengan menunggu waktu yang longgar dan waktu kosong pada saat petugas bekerja. Hambatan pada tempat penyimpanan dokumen rekam medis yang berdebu akan membuat petugas tidak betah ketika melakukan retensi. Hambatan pada keadaan fisik dokumen rekam medis rawat inap terdapat dokumen rekam medis yang tulisannya sudah tidak terbaca atau tulisannya sudah buram dan kertasnya sudah mulai kuning. Hambatan dalam penyimpanan dokumen rekam medis rawat inap karena kurangnya rak penyimpanan yang muat untuk 3 tahun penyimpanan saja. Sehingga untuk dokumen rekam medis rawat inap yang memiliki masa simpan 4 tahun harus diturunkan dari rak penyimpanan rekam medis rawat inap aktif.

Berdasarkan hasil evaluasi diharapkan rumah sakit menyediakan rak penyimpanan rekam medis supaya semua dokumen rekam medis dapat tersusun dengan rapi di rak penyimpanan rekam medis, baik untuk dokumen rekam medis rawat inap yang inaktif dan formulir yang memiliki nilai guna. Penyimpanan formulir yang memiliki nilai guna sebaiknya disimpan pada ordner dan disimpan menggunakan sistem angka akhir (*Terminal Digit Filing*) dan dibedakan berdasarkan poli tujuan pasien. Lalu diberi penanda atau pembatas untuk tahun retensi formulir yang bernilai guna tersebut dan tahun dilakukan retensi pada formulir tersebut. Sehingga memudahkan petugas dalam mencari formulir yang memiliki nilai guna bila dibutuhkan dan menghindarkan dari kerusakan. Petugas Rekam Medis sebaiknya membuat tim khusus retensi hal tersebut dimaksudkan supaya pelaksanaan retensi dapat berjalan sesuai rencana. Kemudian disediakan waktu khusus untuk melaksanakan retensi sehingga dapat mempercepat proses pelaksanaan retensi guna meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan mendukung proses akreditasi Rumah Sakit.